

**PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP KESOPANAN  
PADA MEMO DINAS DI SALAH SATU  
PERGURUAN TINGGI DI BANTEN**

**Dhafid Wahyu Utomo<sup>1</sup>  
Bayu Permana Sukma<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Di ranah formal, seperti di perguruan tinggi, penggunaan bahasa yang formal dan sopan merupakan suatu kewajiban bagi setiap peserta tutur. Pematuhan terhadap prinsip-prinsip tertentu dalam setiap peristiwa tutur sangatlah penting. Tetapi pada kenyataannya, masih ditemukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut khususnya prinsip kesopanan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelanggaran prinsip-prinsip kesopanan pada memo dinas di salah satu perguruan tinggi di Banten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teori Leech (1983) tentang prinsip-prinsip kesopanan dalam menganalisis data. Data utama dalam penelitian ini yakni memo dinas di salah satu perguruan tinggi di Banten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pelanggaran maksim kebijaksanaan dan maksim penghargaan. Simpulan dari penelitian ini bahwa peserta tutur disarankan untuk mematuhi kaidah-kaidah dalam berbahasa, khususnya prinsip kesopanan untuk menjaga rasa kebersamaan, keharmonisan, dan kenyamanan antara penutur dan mitra tutur dalam berkomunikasi.

*Kata Kunci: memo dinas, pelanggaran prinsip kesopanan.*

---

<sup>1</sup> Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Untirta

<sup>2</sup> Pengolah Data di Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD

## **1. Pendahuluan**

Dalam kegiatan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari bahasa karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu butuh berinteraksi dengan sesamanya. Kebutuhan berkomunikasi inilah yang membuat peranan bahasa menjadi sangat penting. Bahasa sangat diperlukan guna menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan perasaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini senada dengan pendapat Wardaugh (1977) yang mengatakan bahwa *language is a system of arbitrary vocal symbol used by human communication*. Jadi, sangat jelas bahwa bahasa sangat diperlukan manusia untuk menjalin komunikasi dengan manusia yang lain di masyarakat.

Bertalian dengan uraian di atas, dalam menjalin komunikasi baik lisan maupun tulisan, peserta tutur dituntut untuk tidak hanya fokus terhadap pesan yang akan disampaikan tetapi juga harus memperhatikan faktor lain dalam berkomunikasi. Faktor yang dimaksud yakni, perasaan mitra tutur. Hal ini senada dengan Wijana (1996) bahwa berbicara tidak selamanya berkaitan dengan masalah yang bersifat tekstual, seringkali pula berhubungan dengan persoalan yang bersifat interpersonal. Peserta tutur dalam menyampaikan pesan harus mempertimbangkan bentuk ujaran yang dianggap tidak menyinggung perasaan mitra tutur tanpa mengurangi isi pesan yang akan disampaikan. Oleh karena itu, agar proses komunikasi berjalan dengan baik dan maksimal, peserta tutur dituntut untuk

mematuhi beberapa prinsip yang dalam ilmu pragmatik disebut sebagai prinsip kerjasama (*cooperative principle*) dan prinsip kesopanan (*politeness principle*).

Di dalam penelitian sederhana ini, untuk membatasi cakupan masalah dan pemerolehan hasil analisis yang mendalam, peneliti hanya akan berfokus kepada salah satu prinsip yakni prinsip kesopanan. Prinsip kesopanan dipilih untuk dibahas dalam tulisan ini, hemat peneliti, karena di dalam proses pertuturan peserta tutur harus mengedapankan untuk menghormati perasaan mitra tutur. Hal ini didukung oleh Nadar (2009) yang mengatakan bahwa penutur menahan sebagian informasi karena taat pada prinsip kesopanan. Lebih lanjut Nadar (2009) mengatakan bahwa pemahaman terhadap prinsip kesopanan sangat penting untuk memahami mengapa prinsip kerjasama tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam proses pertuturan.

Bertalian dengan uraian di atas, fokus dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelanggaran prinsip-prinsip kesopanan pada memo dinas di salah satu perguruan tinggi di Banten. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan dan *feedback* bagi para masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat kampus (baca: akademisi) dalam menyampaikan pesan di memo dinas.

## **2. Landasan Teori**

Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengupas data dalam penelitian ini yakni teori kesopanan dari Leech (1983). Hemat peneliti, untuk membahas kesopanan berbahasa, teori Leech merupakan yang paling komprehensif karena berisi beberapa maksim yang mengatur seseorang ketika bertutur. Lebih lanjut, teori kesopanan Leech (1983) juga dijelaskan oleh para ahli linguistik di antaranya Wijana (1996) dan Azis (2008). Rumusan prinsip kesantunan tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Maksim Kebijaksanaan (*tact maxim*)

Dalam maksim kebijaksanaan setiap peserta pertuturan dituntut untuk meminimalkan kerugian orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Pemilihan bentuk tuturan juga sangat berpengaruh dalam hal ini. Tuturan yang diucapkan secara tidak langsung dianggap lebih sopan dibandingkan dengan tuturan yang diucapkan secara langsung. Memerintah dengan kalimat berita atau kalimat Tanya dipandang lebih sopan dibandingkan dengan kalimat perintah.

### b. Maksim Kedermawanan (*generosity maxim*)

Dasar dari maksim penerimaan yakni mewajibkan setiap peserta tutur untuk memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri, dan meminimalkan keuntungan diri sendiri.

c. Maksim Penghargaan (*approbation maxim*)

Maksim penghargaan menuntut peserta tutur untuk meminimalkan celaan, merendahkan, mencaci mitra tutur serta memaksimalkan penghargaan terhadap mitra tutur.

d. Maksim Kerendahan Hati (*modesty maxim*)

Maksim kerendahan hati menuntut setiap peserta tutur untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri.

e. Maksim Kecocokan (*agreement maxim*)

Maksim kecocokan menuntut setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka, dan meminimalkan ketidakcocokan di antara mereka

f. Maksim Kesimpatian (*sympathy maxim*)

Maksim kesimpatian mengharuskan peserta tutur untuk memaksimalkan rasa simpati, dan meminimalkan rasa antipasti kepada lawan tuturnya.

Selain mematuhi maksim-maksim kesopanan di atas, peserta tutur juga harus memperhatikan tiga prinsip lain, yakni penghindaran pemakaian kata tabu (*taboo*), penggunaan eufemisme, yaitu ungkapan penghalus, dan penggunaan pilihan kata honorific (Leech, 1983).

### **3. Metodologi Penelitian**

Untuk mencapai sebuah tujuan dari sebuah penelitian dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, mutlak

diperlukan sebuah metode. Menurut Sudaryanto (1993) metode adalah cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini dianggap tepat dalam penelitian ini didasarkan kepada sumber data yang akan dianalisis yakni memo dinas dan pengumuman di salah satu perguruan tinggi di Banten yang berwujud data tulis. Hal ini senada dengan Moleong (2005) yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni teknik dokumentasi, yakni dengan membaca dokumen tertulis guna mencari pelanggaran prinsip-prinsip kesopanan dalam memo dinas dan pengumuman pada sebuah perguruan tinggi di Banten. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dan penyajian data menggunakan metode informal (lih. Sudaryanto (1993)).

#### **4. Analisis dan Pembahasan**

Di bagian analisis ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari menyimak memo dinas di salah satu perguruan tinggi di Banten. Data yang akan dibahas dalam bagian ini hanya data bahasa yang melanggar prinsip-prinsip kesopanan di dalam memo dinas tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di landasan

teori, teori kesopanan dari Leech (1983) yang akan digunakan untuk mengupas data dalam penelitian ini.

**a. Pelanggaran Maksim Kebijaksanaan**

Berikut ini akan disajikan beberapa data dari memo dinas yang penggunaan tuturannya melanggar maksim kebijaksanaan.

**Data 1.**

**“Dosen wajib memberikan berkas soal ke bagian administrasi Kelas Reguler C dalam tenggang waktu 1 Minggu sebelum dilaksanakannya ujian. (langsung diserahkan oleh setiap dosen ke bagian kelas Reguler C tanpa melalui administrasi Prodi termasuk penyerahan berkas hasil ujian)”**

Menurut Leech (1983), tuturan pada data 1 di atas telah melanggar maksim kebijaksanaan. Di dalam maksim kebijaksanaan setiap peserta pertuturan dituntut untuk meminimalkan kerugian orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Bentuk tuturan pada data 1 berbentuk kalimat perintah dan langsung. Untuk dapat disebut sopan sebaiknya memerintah menggunakan kalimat berita atau kalimat tanya serta menggunakan kalimat tidak langsung (lih. Wijana 1996). Berikut ini contoh tuturan yang dapat digunakan untuk mengganti tuturan pada data 1 agar menjadi tuturan yang sopan.

**“Dimohon bapak/ibu dosen untuk menyerahkan berkas soal ke bagian administrasi Kelas Reguler C satu Minggu sebelum ujian dilaksanakan”**

Penggunaan kata “*dimohon*” dan “*bapak/ibu*” sebagai kata honorofik, yang sebelumnya tidak digunakan dalam data 1, dapat digunakan untuk memperhalus tuturan tersebut sehingga tuturan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tuturan yang sopan dan tidak dikategorikan sebagai tuturan yang mengancam muka lawan tutur.

**Data 2.**

**“Para Dosen Pengampu tidak dibenarkan meng-input data ke system hanya sebagian (misal, satu mata kuliah pada jam ke 1), tetapi harus semua mata kuliah yang diampu.”**

Tuturan dalam data 2 di atas dapat dikatakan melanggar maksim kebijaksanaan. Selain bermodus langsung, pemilihan diksi pada data 2 dianggap juga kurang tepat. Penggunaan frase “tidak dibenarkan” sebaiknya dihindari karena terkesan kurang sopan. Berikut ini adalah alternatif yang dapat digunakan untuk mengubah tuturan dalam data 2 agar terkesan lebih sopan.

**“Bapak/ibu dosen dimohon untuk *meng-input* semua mata kuliah yang diampu ke sistem”**

Tuturan di data 2, akan terasa lebih sopan dengan menghilangkan beberapa unsur dalam tuturannya yakni menghilangkan diksi yang dianggap kurang tepat dan penambahan kata honorofik.

**Data 3.**

**“Jika butir 5 diabaikan, maka pembayaran hanya untuk yang diinput saja, tetapi sisa mata kuliah lainnya tidak akan mendapatkan pembayaran (hangus, tidak ada lagi disimpan untuk mendapatkan pembayaran pada periode berikut)”**

Tuturan yang digunakan dalam data 3 di atas diyakini bertentangan dengan maksim kebijaksanaan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa, di dalam maksim kebijaksanaan setiap peserta pertuturan dituntut untuk meminimalkan kerugian orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Tuturan dalam data 3 dapat dikatakan merugikan orang lain dalam hal ini dosen. “Butir 5” yang dimaksud dalam tuturan data 3 tersebut yakni, *“Para Dosen Pengampu tidak dibenarkan meng-input data ke system hanya sebagian (misal, satu mata kuliah pada jam ke 1), tetapi harus semua mata kuliah yang diampu”*. Sebaiknya dihindari penggunaan kata *“hangus”* dan diganti dengan kata *“ditunda”* karena honor mengajar sudah merupakan hak bagi dosen yang sudah mengajar mata kuliah yang diampu. Oleh karena itu, disarankan untuk mematuhi maksim kebijaksanaan dalam membuat tuturan sehingga tercipta suatu komunikasi yang nyaman dan tidak adanya pihak yang rugi atau merasa terancam mukanya (lih. Levinson 1983).

**b. Pelanggaran Maksim Penghargaan**

Dalil yang terdapat dalam maksim penghargaan menyatakan bahwa setiap peserta tutur dituntut meminimalkan celan untuk

orang lain dan memaksimalkan pujian pada orang lain. Berikut ini akan disajikan contoh tuturan yang digunakan pada memo dinas yang melanggar maksim penghargaan.

**Data 4.**

**“Adanya kompromi antara dosen dengan mahasiswa tentang penentuan jam pelaksanaan kuliah, yang mungkin idenya berasal dari dosen yang bersangkutan.”**

Tuturan pada data 4 di atas dapat dikatakan melanggar maksim penghargaan. Tuturan dalam data 4 tersebut sangat tidak sesuai dengan maksim penghargaan yang menuntut peserta tutur untuk meminimalkan celaan dan memaksimalkan pujian. Penggunaan kata “mungkin” pada Data 4 menunjukkan perasaan negatif penutur terhadap lawan tutur, yakni dosen. Tuturan tersebut lebih bersifat tuduhan sepihak kepada dosen, karena penutur juga tidak yakin dalam hal ini tidak memiliki bukti sehingga digunakan kata “mungkin” yang dalam tuturan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai tuduhan. Oleh karena itu, sebaiknya kalimat “*yang mungkin idenya berasal dari dosen yang bersangkutan*” dihilangkan dari tuturan tersebut agar membuat tuturan tersebut terkesan lebih sopan.

Contoh lain dari pelanggaran maksim penghargaan adalah pada data 5 di bawah ini yang penggunaan tuturannya sama dengan data 4 di atas.

**Data 5.**

**Masih adanya dosen yang sangat terlambat menyerahkan berkas hasil ujian, karena mungkin lupa/sibuk/ atau melalui administrasi Prodi.**

Untuk memperhalus tuturan pada data 5 sebaiknya dihilangkan kata “*sangat*” dan kalimat “*karena mungkin lupa/sibuk/ atau melalui administrasi Prodi*”

Dari penggunaan tuturan pada memo dinas yang menjadi data pada penelitian ini, hanya ditemukan pelanggaran terhadap 2 tipe maksim kesopanan, yakni pelanggaran maksim kebijaksanaan dan pelanggaran maksim penghargaan. Dari keenam prinsip kesopanan hanya kedua maksim ini yang berpusat pada orang lain (*other centered maxim*). Oleh karena itu, hanya kedua tipe maksim ini yang dilanggar kerana tipe memo dinas yang merupakan komunikasi satu arah.

**5. Simpulan**

Kegiatan bertutur tidak hanya diartikan sebagai proses sekedar menyampaikan pesan tetapi juga harus mempertimbangkan faktor interpersonal yakni perasaan lawan tutur. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tuturan dalam memo dinas di salah satu perguruan tinggi di Banten melanggar maksim kebijaksanaan dan maksim penghargaan. Hal ini sebaiknya dihindari terlebih lagi memo dinas termasuk ke dalam ranah formal. Penutur sebaiknya mempertimbangkan aspek-aspek lain, yakni prinsip kesopanan, selain berfokus kepada

penyampaian pesan sehingga tuturan yang akan disampaikan tidak akan menyinggung atau melukai perasaan mitra tutur.

## **6. Daftar Pustaka**

- Azis, E. Aminudin. 2008. *Horizon Baru Teori Kesantunan Berbahasa: Membingkai yang Terserak, Menggugat yang semu, Menuju Universalisme yang Hakiki*. Dipresentasikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Linguistik pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia 21 Oktober 2008.
- Leech, Geoffrey. 1983. *Principles of Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levinson, Stephen. 1983. *Pragmatics*. London: Cambridge University Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nadar, F.X. 2009. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Wardhaugh, Ronald. 1977. *Introduction to Linguistics*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.